

BAB III

Dinamika Konflik Etnis Rohingya

Myanmar adalah Negara *Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)* yang merupakan salah satu NGO yang berbasis kelompok keagamaan di Indonesia, MDMC ikut berperan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan ke Myanmar dalam isu Rohingya. *Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)* merupakan lembaga dibawah negara Republik Indonesia.

Rohingya baru muncul pada tahun 1950-an, setelah kemerdekaan Myanmar. Rohingya adalah penduduk Muslim yang tinggal di Arakan, Rakhine, Myanmar. Dari sudut kebahasaan, bahasa yang diklaim sebagai bahasa Rohingya sebenarnya termasuk ke dalam rumpun bahasa Indo-Eropa, khususnya kerabat bahasa Indo-Arya. Lebih detail lagi, bahasa Rohingya dikategorikan sebagai bahasa-bahasa Chittagonia yangdituturkan oleh masyarakat di bagian tenggara Bangladesh. Sementara itu, kebanyakan bahasa di Myanmar tergolong rumpun Tai Kadal Austroasiatik, atau Sino-Tibetan.

Krisis kemanusiaan Rohingya telah terjadi sejak masa penjajahan masih berlangsung di Myanmar. Penyebab krisis kemanusiaan Rohingya antara lainyaitu konflik antar etnis yang melibatkan Rohingya dengan etnis setempat dan sikap diskriminasi pemerintah Myanmar terhadap Rohingya yang menolak etnis Rohingya sebagai salah satu etnis resmi yang ada di Myanmar.

A. Profil Negara Myanmar

Gambar 3.3 Peta Myanmar



Sumber : (Myanmar)

Myanmar adalah negara berada di Asia Tenggara. Myanmar berbatasan dengan India dan Bangladesh disebelah barat, Thailand dan Laos di sebelah timur dan China di sebelah utara dan timur laut. Negara seluas 676.578 km² ini telah diperintah oleh pemerintahan militer sejak kudeta tahun 1988. Negara ini adalah negara berkembang dan memiliki populasi lebih dari 51 juta jiwa (sensus 2014) (Bank, 2012) Ibu kota Myanmar sebelumnya terletak di Yangon sebelum dipindahkan oleh pemerintahan junta militer ke Naypyidaw pada tanggal 7 November 2005. Myanmar telah bergabung sebagai anggota perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) sejak tahun 1997.

Peradaban awal Myanmar penduduk menggunakan bahasa Tibeto Burma di Burma Utara dan kerajaan Mon di Burma Selatan. Pada abad ke-9, penduduk Bamar memasuki lembah dan sungai Irrawaddy, diikuti dengan didirikannya kerajaan pangan tahun 1050-an. Sejak saat itu, Theravada perlahan-lahan menjadi dominan di Myanmar. Setelah itu kerajaan pangan jatuh akibat invansi Mongol. Pada abad ke-16. Setelah disatukan oleh Dinasti Taungoo, Negara ini sesaat pernah menjadi kekaisaran terbesar dalam sejarah Asia Tenggara (Database, 2014). Pada abad ke-19, Dinasti Konbaung menguasai daerah yang didalamnya termasuk wilayah Myanmar modern saat ini dan sesaat menguasai Manipur dan Assam. Inggris menguasai Myanmar setelah 3 perang Anglo-Burma pada abad ke-19 dan Negara ini kemudian menjadi koloni Inggris. Myanmar mendapatkan kemerdekaan tahun 1948, awalnya sebagai Negara demokrasi, namun setelah kudeta tahun 1962, negara ini dikuasai militer.

Setelah mereka, negara ini banyak mengalami kekerasan etnis. Selama periode ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan banyak organisasi lainnya melaporkan terus terjadi pelanggaran hak asasi manusia secara konsisten dan sistematis. Pada tahun 2011, junta militer dibubarkan setelah pada tahun 2010 diadakan pemilihan umum, dan pemerintahan sipil dimulai. Hal ini, bersamaan dengan dilepasnya Aung San Suu Kyi dan tahanan politik lainnya, telah memperbaiki

catatan hak asasi manusia dan hubungan luar negeri negara ini, memungkinkannya terbebas dari sanksi ekonomi. Namun, negara ini belum terbebas dari kritik akibat perlakuan pemerintah terhadap etnis minoritas. Pada pemilihan umum 2015, partai Aung San Suu Kyi menang mayoritas di parlemen. Namun, militer Myanmar tetap menjadi kekuatan utama di politik.

Myanmar adalah negara yang kaya dengan giok, batu permata, minyak bumi, gas alam, dan mineral lain. Ketimpangan pendapatan di Myanmar adalah salah satu yang terlebar di dunia, karena sebagian besar ekonomi dikuasai oleh sebagian orang yang disokong militer. Hingga 2016, Myanmar menempati posisi 145 dari 188 negara di dunia menurut Indeks Pembangunan Manusia.

Dalam menjalankan pemerintahannya, junta militer yang dipimpin oleh Jenderal Ne Win membuat Myanmar cenderung menutup diri dari pihak asing sesuai dengan kebijakan isolasi yang diterapkannya. Pemerintah militer juga menerapkan ideologi sosialisme dengan istilah *Burmese Way to Socialism* sebagai dasar bagi sistem politik dan ekonomi. Selain itu, pemerintah hanya mengakui adanya satu partai politik yang bernama *Burmese Socialist Program Party* (BSPP) atau Partai Lenzin dengan mayoritas anggotanya adalah golongan militer serta menghapus semua partai oposisi yang ada di negaranya.

Kendali penuh militer dalam politik juga terlihat pada pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 1990. Pemilu tersebut diadakan oleh pemerintah Myanmar untuk meredam aksi demonstrasi yang terjadi tahun 1988 dan untuk menanggapi surat terbuka yang disampaikan oleh Aung San Suu Kyi, tokoh demokratisasi Myanmar pada tanggal 15 Agustus 1988. Aung San Suu Kyi dan tokoh pro demokrasi lainnya lalu membentuk sebuah partai yang bernama *National League for Democracy* (NLD). Mereka melakukan kampanye untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat Myanmar yang juga menginginkan perubahan dalam sistem perpolitikan di negaranya. Hasilnya partai NLD memperoleh suara sebesar

80,82 persen dan menang mutlak atas partai *State Law and Order Restoration Council* (SLORC) pemerintah junta militer. Pemerintah junta militer mengabaikan hasil pemilu dan malah melakukan penahanan terhadap Aung San Suu Kyi dan beberapa tokoh pro demokrasi lainnya. Mereka dianggap sebagai pemberontak dan penyebab dari ketidakstabilan politik yang terjadi di Myanmar.

Selanjutnya dalam bidang ekonomi, kendali pemerintah junta militer terlihat dalam pengambilan keputusan ekonomi tanpa memperhatikan nasib rakyat Myanmar. Pada tahun 1998 pemerintah junta mengeluarkan kebijakan mengenai penurunan nilai mata uang yang menyebabkan uang kertas bernilai besar tidak berlaku lagi. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat Myanmar kehilangan tabungan yang mereka miliki. Akibat peristiwa tersebut masyarakat Myanmar mulai melakukan protes melalui demonstrasi yang dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1998. Demonstrasi ini juga disebabkan oleh ketidakpuasaan masyarakat terhadap pemerintah Myanmar yang dinilai gagal dalam memimpin Myanmar dan adanya keinginan dari masyarakat untuk melakukan perubahan sistem pemerintahan menuju sistem demokrasi. Demonstrasi ini menyebabkan 3000 demonstran tewas akibat tindakan pemerintah junta yang melakukan kekerasan dan tindakan represif kepada mereka, peristiwa ini dikenal dengan sebutan Uprising 8888.

Selanjutnya pada tahun 2007, peristiwa serupa juga kembali terjadi akibat kebijakan yang diambil oleh pemerintah Myanmar yang mencabut subsidi terhadap impor diesel dan gas alam yang biasanya digunakan untuk transportasi dan listrik oleh masyarakat yang menyebabkan kenaikan harga mencapai 500%. Masyarakat Myanmar kembali melakukan demonstrasi untuk memprotes kebijakan ini. Para biksu yang terlibat dalam demonstrasi ini diserang secara brutal dengan mengikat mereka pada tiang, lalu memukul serta melepaskan jubah yang mereka pakai.

Pengendalian penuh militer dalam segala aspek kehidupan yang banyak merugikan masyarakat, pelanggaran

HAM yang dilakukan oleh pemerintah junta militer dan penangkapan tokoh-tokoh pro demokrasi akibat pemilu tahun 1990 menimbulkan kemarahan dunia internasional. Banyak sanksi yang diberikan oleh dunia internasional sejak tahun 1998 kepada Myanmar. Sanksi tersebut misalnya berupa penghentian semua bantuan dan pinjaman kepada pemerintah Myanmar yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Embargo senjata dan ekonomi juga dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Sistem hukum Myanmar terutama menggunakan hukum umum dan hukum tradisional pada 1885 Inggris menyatakan Myanmar sebagai koloni mereka dan melaksanakan hak hukum umum. Mulai saat ini, negara kita sedang berolahraga sebagai hukum undang-undang. Juga Myanmar, tradisi mereka dipraktikkan sebagai Hukum Myanmar Tradisional. Kemudian dua jenis praktik hukum sebagai hukum positif dengan menulis, revisi, menyelesaikan dan berkembang pada saat ini. Selain itu, pemerintah SPDC membuat UU banyak dan hukum bahwa mereka bertujuan untuk membatasi orang. Setelah itu, pemerintah SPDC mengatakan "Myanmar adalah Bangsa kedaulatan independen dan kekuasaan Kedaulatan Uni berasal dari warga negara dan menegakkan di seluruh negeri" tetapi mereka mengendalikan kekuasaan dan membatasi *citizens*. Sistem hukum harus memisahkan, periksa dan menyeimbangkan tiga jenis kekuasaan seperti legislatif, kekuasaan eksekutif, dan yudikatif. kekuasaan kedaulatan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif terpisah, sejauh mungkin, dan melakukan kontrol timbal balik, memeriksa dan menyeimbangkan.

Di Myanmar, pengadilan dibentuk seperti mahkamah agung Perhimpunan bahwa U adalah keadilan kepala Union, pengadilan Tinggi Daerah, pengadilan Tinggi Negara (memiliki keadilan petugas adalah dua sampai enam orang) Pengadilan Diri - Divisi Diperintah, Pengadilan Zona Diri Administered, Pengadilan Distrik, Township Pengadilan dan lainnya dibentuk oleh hukum, Majelis Pengadilan Militer dan

Konstitusi Perhimpunan (U TheinSoe adalah ketua pengadilan itu) Pada tahun 2008 bagian konstitusi untuk menegakkan keadilan secara independen menurut hukum, untuk menegakkan keadilan di pengadilan terbuka kecuali dinyatakan dilarang oleh hukum dan untuk menjamin dalam semua kasus hak pembelaan dan hak-hak banding menurut hukum.

Sistem Ekonomi Myanmar berasaskan pertanian dan fungsi terutama pada kas dan sistem barter. Industri utamanya dikontrol oleh militer yang dikelola perusahaan-perusahaan negara. Setiap aspek kehidupan ekonomi diserap oleh pasar gelap, di mana reaksi harga meroket terhadap control harga resmi sejak tahun 1989, SPDC kebijakan ekonomi pasar terbuka telah membawa banjir investasi asing di minyak dan gas (oleh perusahaan-perusahaan Barat), dan dalam kehutanan, pariwisata, dan pertambangan (oleh perusahaan-perusahaan Asia). Ledakan yang dihasilkan dalam perdagangan dengan Cina telah mengubah Myanmar kurang berkembang menjadi pusat bisnis yang berkembang pesat. Sebuah program pemberantasan narkotika telah dimulai di perbatasan timur laut negara bagian, yang menyumbang sekitar 60% dari heroin dunia, dengan mendorong petani untuk menanam tanaman pangan bukan poppies. Beberapa rencana ada untuk sektor manufaktur, dan ketergantungan pada impor Myanmar, negara bersumber harga tinggi, menderita control ketat dari pemerintah kebijakan ekonomi yang tidak efisien, dan kemiskinan rural.

Junta (aktivis Myanmar) mengambil langkah-langkah pada awal 1990an untuk membebaskan ekonomi setelah berdekade mengalami kegagalan di bawah “*Burmese Way to Socialism*” tetapi usaha tersebut tertahan, dan beberapa tindakan liberalisasi ditunda. Myanmar tidak memiliki stabilitas moneter ataupun fiskal, Akibatnya ketidakseimbangan kondisi makroekonomi termasuk inflasi, nilai tukar resmi berfluktuasi tidak sesuai dengan nilai kyat Myanmar, dan suku bunga rezim yang tidak jelas. Sebagian besar bantuan pembangunan tertahan setelah Junta mulai

menekan pergerakan demokrasi di 1988 dan menolak menerima hasil pemilihan legislatif tahun 1990. Sebagai respon terhadap penyerangan Myanmar di Mei 2003 terhadap Aung San Suu Kyi dan pendukungnya, AS memaksakan sanksi ekonomi baru terhadap Myanmar termasuk larangan impor produk Myanmar dan larangan berpelayanan financial oleh personel AS. Iklim investasi yang buruk juga memperlambat arus nilai tukar asing. Sektor yang paling produktif hanya di industri ekstraktif, khususnya minyak dan gas, penambangan dan kayu mentah. Area lain, seperti pabrik dan lain-lain.

B. Konflik Etnis Rohingya

Rohingya baru muncul pada tahun 1950-an, setelah kemerdekaan Myanmar. Rohingya adalah penduduk Muslim yang tinggal di Arakan, Rakhine, Myanmar. Dari sudut kebahasaan, bahasa yang diklaim sebagai bahasa Rohingya sebenarnya termasuk ke dalam rumpun bahasa Indo-Eropa, khususnya kerabat bahasa Indo-Arya. Lebih detail lagi, bahasa Rohingya dikategorikan sebagai bahasa-bahasa Chittagonia yang dituturkan oleh masyarakat di bagian tenggara Bangladesh. Sementara itu, kebanyakan bahasa di Myanmar tergolong rumpun Austroasiatik atau Sino-Tibetan. (Sawal, 2017)

Menurut catatan sejarah, ada beberapa versi asal muasal bangsa Rohingya di Myanmar. Pertama, ada yang mengatakan bahwa mereka bukan keturunan Arab tetapi generasi Muslim Chittagonian yang bermigrasi dari Bengal (Bangladesh sekarang) saat Burma dijajah oleh Inggris (Sawal, 2017). Kedua, terminologi Rohingya mulai dikenal untuk penamaan sebuah komunitas oleh sebagian kecil kaum intelektual Muslim Bengal yang mendiami bagian tenggara Arakan di awal 1950-an. Mereka adalah keturunan para

imigran berasal dari Chittagong Timur Bengal dengan perjanjian Yandabo saat perang Inggris-Burma I berakhir (1824-1826) (Chan, (2005). Ketiga, dalam skrip Ananda Chandra dikatakan pada tahun 957 SM, terjadi migrasi populasi Tibeto-Burman Theravada Buddhist ke kawasan Arakan. Dengan mengalahkan bala tentara Chandra mereka menguasai Arakan dan orang-orang yang berparas seperti India kembali mendiami wilayah bagian utara Arakan atau balik ke Bengal. Ini merupakan exodus orang berparas India pertama ke Bengal (Bahar, 2012). Keempat, Rohingya adalah masyarakat mayoritas Muslim dan minoritas Hindu secara rasial berasal dari Indo-Semitic. Mereka bukanlah kelompok (Arakan Rakhine) etnis yang berkembang dari gabungan satu suku atau ras tertentu. Mereka adalah percampuran Brahmin dari India, Arab, Moghuls, Bengals, Turks, dan Asia Tengah yang mayoritas sebagai pedagang, pejuang, dan juru dakwah datang melalui laut dan berdiam diri di Arakan. Pada zaman Chandra, mereka bercampur baur dengan masyarakat lokal dan melahirkan generasi masyarakat Rohingya (Bahar, 2012).

Lebih dari itu, dikatakan pula kemunculan pemukiman Muslim di Arakan sebagai cikal bakal kelompok Rohingya terlacak sejak zaman Kerajaan Mrauk U, khususnya pada zaman Raja Narameikhla (1430-1434). Setelah dibuang ke Bengal, Narameikhla lalu menguasai kembali Mrauk U berkat bantuan Sultan Bengal. Seiring dengan berkuasanya Narameikhla, masuk pula penduduk Muslim dari Bengal ke wilayah Arakan, Rakhine. Dalam perkembangannya, jumlah pemukim muslim dari Bengal terus bertambah, terutama ketika Inggris menguasai Rakhine. Karena kurangnya populasi di Rakhine, Inggris memasukkan banyak orang Bengali ke Rakhine untuk bekerja sebagai petani. Oleh karena itu, sampai saat ini pula, kebanyakan orang Rohingya bekerja di sektor agraris. (Sawal, 2017)

Ketika Inggris melakukan sensus penduduk pada 1911, pemukim Muslim di Arakan sudah berjumlah 58.000 orang. Jumlah itu terus bertambah pada tahun 1920-an ketika Inggris menutup perbatasan India, sehingga orang-orang

Bengali memilih masuk ke Rakhine. Sejak tahun-tahun ini pula mulai timbul konflik antara Rohingya dengan penduduk lokal yang mayoritas merupakan penganut Buddha. Bertambahnya jumlah penduduk migrant membuat penduduk lokal khawatir (Hartati, 2013).

Akan tetapi, selain beberapa paparan tentang asal-usul etnis Rohingya di atas, seorang sejarawan Jaques P. Leider mempunyai pendapat tentang asal-usul etnis Rohingya itu sendiri. Ia mengatakan bahwa pada abad ke-18 ada catatan seorang Inggris yang bernama Francis Buchanan-Hamilton yang sudah menyebutkan adanya masyarakat Muslim di Arakan. Mereka menyebut diri mereka "Rooinga". Ada yang mengatakan bahwa istilah ini berasal dari kata "rahma" (rahmat) dalam bahasa Arab atau "rongha" (perdamaian) dalam bahasa Pashtun. Selain itu, ada pula yang mengaitkannya dengan wilayah Ruhadi Afghanistan yang dianggap sebagai tempat asal Rohigya. (Hartati, 2013)

Meski sudah tinggal berabad-abad lamanya di Myanmar, pemerintah Myanmar menganggap Rohingya bukan kelompok etnis asli. Keturunan Rohingya tetap dipandang sebagai pengungsi ilegal dari negara tetangga Bangladesh. Di pihak lain, Bangladesh juga tidak mengakui mereka sebagai warga negara (Kompas, Menelisik Akar Pengungsi Rohingya, 2015). Menurut Burmese *Rohingya Organisation UK* (Brouk) atau organisasi Rohingya di Inggris, Pemerintah Myanmar selalu membuat kebijakan yang menekan kelompok etnis Rohingya sejak 1970-an. Tekanan terhadap warga Rohingya secara bertahap meningkat sejak proses reformasi yang diperkenalkan Thein Sein pada 2011. (Kompas, 2015)

Dengan demikian, terlepas apakah Rohingya merupakan sebuah etnis atau tidak? Apakah masuk ke dalam kategori salah satu etnis di Myanmar atau tidak? Rohingya merupakan komunitas migran yang sudah lama menetap di sebuah wilayah yang kebetulan kini menjadi bagian dari negara Myanmar, tentu saja sudah selayaknya mereka mendapatkan hak-hak dasar mereka, terutama status kewarganegaraan. Meskipun begitu, sikap pemerintah

Myanmar sudah jelas seperti yang disampaikan Thein Sein bahwa Myanmar tak mungkin memberikan kewarganegaraan kepada Rohingya (Hartati, 2013).

C. Konflik Antara Etnis Rohingya dan Etnis Rakhine

Konflik Rohingya pada dasarnya diawali dengan penolakan identitas dan kewarganegaraan mereka. Myanmar secara resmi mengakui 135 kelompok etnis, tersebar di seluruh negara. Namun, sebagian besar etnis minoritas tinggal pada negara bagian sesuai nama dari etnis tersebut, seperti Chin, Kachin, Karen, Kayah, Mon, Rakhine, dan Shan. Adapun Rohingya tidak termasuk di dalam etnis yang diakui. (Sawal, 2017)

Menurut laporan *Human Right Watch* yang berjudul “*All you can do is pray, crime againts humanity and ethnic cleansing of Rohingya Muslims inBurma’s Arakan State*”, menerangkan bahwa konflik kontemporer ini dapat ditarik berawal dari Perang Dunia Kedua, ketika masyarakat Rohingya tetap loyal pada penguasa Inggris (Human Rights Watch, 2013). Sementara etnis lain berpihak pada kolonial Jepang.

Disisi lain, sejarawan Prancis Dr. Jacques P. Leider yang meriset sejarah Arakan sejak dua dekade silam menyatakan bahwa akar masalahnya bukan karena sikap rasis kaum Buddha Rakhine tetapi itu lebih pada reaksi emosional mereka yang sangat kuat. Sebuahemosi reaksional yang berangkat dari kondisi dimana desa-desa di Rakhine banyak didiami oleh Muslim dengan pertumbuhan populasi yang masif. (Sawal, 2017)

Keluhan etno-demografis menjadi penyebab konflik antara populasi Buddha dan Muslim Rohingya di Rakhine.

Pemimpin Buddha nasionalistik, seperti biksu kontroversial Ashin Wirathu, mempunyai pernyataan bahwa pertumbuhan populasi yang cepat dan tingkat kesuburan yang baik mengancam untuk mengalahkan populasi masyarakat Buddha setempat, yang mana hal ini mencerminkan sentimen masyarakat Rakhine setempat. (Sawal, 2017)

Biksu muda ini berasal dari Mandalay yang dijuluki “*The Fighting Monk*” (Biksu Petarung) sebagai otak konflik berdarah dan pembersihan etnis terhadap masyarakat Rohingya. Asia Times menstigma agamawan Buddha ini dengan “*Leader of growing anti Muslim movement*” (Pemimpin gerakan anti- Muslim yang kian tumbuh). (Asia Times, 2003)

Pada tanggal 14 September 2003 lalu, ia berbicara di hadapan sekitar tiga ribu biksu memprovokasi mereka untuk punya pandangan yang sama dengan dia bahwa Muslim adalah maling dan teroris. Wirathu adalah orang pertama yang mengklaim bahwa sanksi Amerika terhadap Myanmar bukan karena pemerintahan junta militer, tetapi karena eksistensi teroris Muslim yang diklaim. Dalam salah satu pernyataan yang ia lontarkan, Wirathu mengatakan:

We have a problem in Myanmar, we have a problem here in Mandalay. The problem is called Islam. There are many new Muslims in Mandalay from Pakistan (and Bangladesh). These people are thieves and terrorists. They do not respect our religion and our women. We are Buddhist, and we are peaceful, but we must protect ourselves . (Asia Times, 2003)

Pemerintah Myanmar telah menanggapi masalah terkait dengan menargetkan Rohingya dengan kebijakan yang menindas, termasuk pembatasan melahirkan bagi perempuan Rohingya (Blomquist, 2016). Kekerasan terhadap Rohingya yang terus terjadi, termasuk kerusuhan di Arakan, Rakhine pada tahun 2012, telah mengakibatkan hancurnya rumah masyarakat Rohingya dan menyebabkan gelombang

“*boat people*” Rohingya yang mencari perlindungan di sepanjang garis pantai. Termasuk pesisir negara-negara Asia Tenggara.

Kompetisi sumber daya alam dan keinginan untuk melindungi identitas Buddha juga dapat dijadikan sebagai beberapa alasan penyebab konflik Rohingya dan etnis setempat. Pada kenyataannya, di Myanmar, populasi mayoritas Buddha menganggap minoritas Muslim sebagai ancaman terhadap keamanan berdasarkan perbedaan dalam pertumbuhan penduduk. Terutama di negara bagian Rakhine, yang mana populasi Rohingya menempati kira-kira 30% total dari populasi, nasionalis dan penduduk lokal kemudian mengklaim tingginya tingkat kesuburan dan pertumbuhan penduduk yang cepat akan mengancam membanjiri komunitas Buddha setempat. (Blomquist, 2016)

Berdasarkan “Dilema Keamanan Demografis”, yaitu sebuah model demografi politik yang diajukan oleh Christian Leuprecht, penelitian ini memaparkan bahwa ketika tingkat pertumbuhan penduduk Rohingya melampaui kelompok etnis lain, ancaman yang dirasakan akan kepunahan mutlak dan atau budaya dapat meningkat menjadi siklus antara ketakutan dan tanggapan di antara pemangku kepentingan pada negara-negara bagian. (Blomquist, 2016)

Kurangnya data yang tersedia menimbulkan tantangan signifikan untuk menelusuri lebih lanjut hal ini. Kebijakan pemerintah yang membatasi akses terhadap demografi Myanmar dan sensus pada tahun 2014 tidak memasukkan informasi terperinci tentang Rohingya. Namun, jika meninjau Dilema Demografi Keamanan Leuprecht akibat populasi Rohingya yang terus meningkat dari kelompok lain di Myanmar, kelompok etnis lain (khususnya Buddha Rakhine) tingkat ketakutan akan pemindahan dan kepunahan budayanya menyebabkan siklus konflik terus berlanjut. Ketakutan ini juga akan memperkuat kebijakan pemerintah yang represif sehingga dapat memperparah konflik. (Sawal, 2017)

Dari beberapa pandangan tentang konflik etnis Rohingya dan etnis Rakhine yang telah penulis paparkan,

penulis beranggapan bahwa konflik antara etnis Rohingya dan etnis Rakhine yang telah terjadi sejak masa penjajahan berlangsung di Myanmar (Burma), terjadi karena perbedaan agama di antara kedua etnis ditambah berbagai persoalan lainnya seperti masalah demografi, politik, dan ekonomi. (Sawal, 2017)

Perkembangan konflik kemudian terjadi pada kerusuhan Mei 2012 yang telah memicu perhatian dunia internasional. Secara umum, kekerasan dipicu oleh kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap perempuan Buddha yang diduga dilakukan oleh laki-laki Muslim. Kejadian tersebut kemudian memicu kekerasan massal berupa pembunuhan dan penyiksaan, pembakaran rumah dan properti serta pemaksaan untuk meninggalkan tempat tinggal, terutama terhadap orang-orang muslim minoritas. (Raharjo, 2015)